

ADMINISTRASI PENDIDIKAN ISLAM: TINJAUAN INTEGRATIF DAN MODEL TATA KELOLA BERBASIS NILAI

Trian Hermawan^{1*}, Muhammad Akmansyah², Zulhannan³, Fachrul Ghazi⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

trian.hm@gmail.com¹, akmansyah@radenintan.ac.id², zulhannan@radenintan.ac.id³, fachrul.ghazi@radenintan.ac.id⁴

ARTICLE INFO

Article history:

Received 09 Juli 2026

Revised 19 Juli 2026

Accepted 29 Juli 2026

Available online 29 Juli 2026

Kata Kunci:

administrasi pendidikan Islam, tinjauan integratif, tata kelola, amanah, model konseptual

Keywords:

Islamic educational administration, integrative review, governance, amanah, conceptual model

ABSTRAK

Administrasi pendidikan Islam kerap dirumuskan sebagai seperangkat nilai normatif, sehingga hubungan antara nilai, mekanisme administrasi, dan luaran kelembagaan belum dijelaskan secara memadai. Artikel ini bertujuan menyintesis struktur konseptual administrasi pendidikan Islam dan merumuskan model tata kelola berbasis nilai yang dapat diuji. Penelitian menggunakan tinjauan literatur integratif melalui lima tahap: identifikasi masalah, penelusuran, evaluasi, analisis, dan penyajian. Korpus analisis meliputi enam literatur berbahasa Arab dan delapan studi empiris terbitan 2023–2025. Hasil menunjukkan bahwa nilai Islam tidak bekerja secara otomatis terhadap kinerja. Amanah memerlukan transparansi, kompetensi, dan pengendalian; syura dan tabayyun memerlukan data serta representasi pemangku kepentingan; keadilan dan maslahah memerlukan kriteria distribusi dan analisis dampak; sedangkan hisbah dan itqan memerlukan audit, koreksi, dan perbaikan berkelanjutan. Sintesis menghasilkan Model Administrasi Pendidikan Islam Integratif yang menghubungkan nilai, mekanisme, kapasitas kontekstual, dan luaran. Model ini menjadi dasar konseptual bagi pengembangan instrumen dan pengujian empiris pada lembaga pendidikan Islam

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

ABSTRACT

Islamic educational administration is often formulated as a set of normative values, leaving the relationship between values, administrative mechanisms, and institutional outcomes insufficiently explained. This article synthesizes the conceptual structure of Islamic educational administration and develops a testable value-based governance model. The study applies an integrative literature review through five stages: problem identification, literature search, data evaluation, analysis, and presentation. The corpus comprises six Arabic-language works and eight empirical studies published from 2023 to 2025. The findings indicate that Islamic values do not automatically produce performance. Amanah requires transparency, competence, and control; shura and tabayyun require valid data and stakeholder representation; justice and maslahah require distributive criteria and impact assessment; while hisbah and itqan require audit, correction, and continuous improvement. The synthesis produces an Integrative Islamic Educational Administration Model linking values, mechanisms, contextual capacity, and outcomes. The model supports instrument development and empirical testing in Islamic educational institutions.

1. PENDAHULUAN

Administrasi pendidikan menentukan kemampuan lembaga untuk menerjemahkan visi ke dalam program, membagi kewenangan, mengelola sumber daya, menjaga mutu layanan, dan mempertanggungjawabkan hasil. Kebutuhan tersebut semakin penting bagi madrasah, pesantren, sekolah Islam, dan perguruan tinggi Islam yang menghadapi tuntutan akreditasi, transparansi, transformasi digital, dan peningkatan kepercayaan publik. Instrumen administrasi modern seperti perencanaan strategis, struktur organisasi, indikator kinerja, audit, dan sistem informasi dapat meningkatkan keteraturan. Namun, keteraturan prosedural tidak selalu menjamin keputusan yang adil,

*Corresponding author

E-mail addresses: trian.hm@gmail.com

penggunaan data yang bertanggung jawab, atau distribusi sumber daya yang berpihak pada kebutuhan pendidikan.

Administrasi pendidikan Islam hadir pada titik pertemuan antara rasionalitas manajerial dan orientasi etik. Al-Qur'an menempatkan amanah dan keadilan sebagai dasar penggunaan kewenangan, menegaskan musyawarah dalam urusan bersama, serta memerintahkan verifikasi informasi sebelum tindakan diambil (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Nilai tersebut memberi kriteria tentang apa yang benar dan patut. Meskipun demikian, nilai normatif tidak dengan sendirinya membentuk tata kelola. Lembaga tetap memerlukan struktur kewenangan, prosedur keputusan, mekanisme pengawasan, kompetensi pelaksana, dan indikator hasil agar nilai dapat bekerja dalam praktik.

Literatur berbahasa Arab menyediakan struktur konsep yang dapat menjembatani kebutuhan tersebut. Al-idārah menjelaskan pengelolaan organisasi secara terpadu. Al-tadbīr berkaitan dengan penataan tujuan, prioritas, risiko, dan tindakan. Al-tanzhīm mengatur pembagian tugas, kewenangan, serta koordinasi. Al-riqābah menjelaskan pemantauan, evaluasi, dan koreksi. Sementara itu, al-amānah, al-shūrā, al-'adl, al-maṣlahah, dan al-itqān memberikan orientasi tanggung jawab, partisipasi, keadilan, manfaat, dan mutu. Perbedaan fungsi istilah ini penting karena penerjemahan seluruh konsep ke dalam kata "manajemen" dapat menghilangkan struktur analitisnya (Abu 'Azzam, 2020; Al-'Ajami, 2013; Al-Ba'dani, 2013).

Kajian sebelumnya telah menunjukkan relevansi prinsip Islam bagi tata kelola. Syarif dan Nadzri (2024) menempatkan amanah, keadilan, ihsan, syura, keberanian moral, dan hikmah sebagai prinsip pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Rini et al. (2025) menunjukkan pentingnya integrasi nilai Islam dalam pengambilan keputusan pendidikan. Pada tingkat organisasi, Badar et al. (2024) menemukan bahwa etika kerja Islam berhubungan dengan kinerja melalui iklim hubungan pegawai. Amar et al. (2025) juga menunjukkan bahwa maqasid syariah memberi pengaruh tidak langsung terhadap kinerja melalui manajemen strategis. Kedua temuan tersebut menegaskan bahwa nilai memerlukan mekanisme perantara sebelum menghasilkan luaran organisasi.

Bukti pada lembaga pendidikan memperlihatkan pola yang sejalan. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan akses, fleksibilitas, interaksi, dan kinerja guru, tetapi hasilnya dipengaruhi kompetensi, infrastruktur, pelatihan, supervisi, dan pemerataan akses (Abidin et al., 2025; Kurniawan et al., 2024; Mintasih et al., 2024; Zakiyyah et al., 2024). Pada perguruan tinggi Muhammadiyah, kepemimpinan berbasis nilai memperkuat kepercayaan, kolaborasi, dan profesionalitas, tetapi implementasinya tetap menghadapi kesenjangan komunikasi dan konsistensi antarunit (Rediyono et al., 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa nilai, kapasitas organisasi, dan konteks implementasi saling berhubungan.

Meskipun literatur berkembang, terdapat tiga kesenjangan. Pertama, istilah administrasi dalam literatur Arab belum selalu dibedakan berdasarkan fungsi konseptual dan operasionalnya. Kedua, amanah, syura, keadilan, masalah, hisbah, dan itqan masih sering disajikan sebagai daftar nilai, bukan sebagai mekanisme desain organisasi. Ketiga, bukti empiris tentang kepemimpinan, strategi, keuangan, mutu, dan digitalisasi masih terpisah sehingga belum membentuk penjelasan terpadu mengenai bagaimana nilai Islam diterjemahkan menjadi hasil kelembagaan.

Artikel ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana struktur makna dan fungsi konsep administrasi pendidikan Islam dalam literatur berbahasa Arab? Kedua, mekanisme apa yang menjelaskan hubungan antara nilai Islam dan luaran tata kelola pendidikan berdasarkan sintesis bukti empiris? Artikel ini bertujuan mengembangkan klarifikasi terminologis, sintesis mekanisme, dan model konseptual yang dapat diuji.

Kontribusi artikel terletak pada perumusan Model Administrasi Pendidikan Islam Integratif atau MAPII. Model ini tidak mengasumsikan bahwa nilai secara otomatis menghasilkan kinerja. MAPII menjelaskan rantai nilai-mekanisme-kapasitas-luaran. Amanah diterjemahkan melalui transparansi, kompetensi, dan pengendalian; syura serta tabayyun melalui representasi dan validasi data; keadilan serta masalah melalui kriteria distribusi dan analisis dampak; sedangkan hisbah dan itqan melalui audit, koreksi, serta perbaikan berkelanjutan. Dengan struktur tersebut, administrasi pendidikan Islam dapat dibahas secara lebih logis, terukur, dan relevan dengan kebutuhan kelembagaan kontemporer.

2. METODE

Penelitian menggunakan tinjauan literatur integratif dengan analisis isi komparatif. Tinjauan integratif dipilih karena kajian menggabungkan sumber normatif-konseptual, literatur berbahasa Arab, dan penelitian empiris dengan desain yang berbeda. Metode ini bertujuan menghasilkan sintesis dan pengembangan konsep, bukan menghitung besaran efek atau prevalensi temuan. Prosedur kajian mengadaptasi lima tahap [Whittemore dan Knafl \(2005\)](#), yaitu identifikasi masalah, penelusuran literatur, evaluasi data, analisis data, dan penyajian sintesis. Prinsip transparansi dan theory-building juga merujuk pada [Snyder \(2019\)](#), [Torraco \(2016\)](#), serta [Cronin dan George \(2023\)](#).

Penelusuran dilakukan pada Juni 2026 melalui GARUDA, portal jurnal penerbit, dan pencarian akademik berbasis kata kunci. Kata kunci Indonesia dan Inggris mencakup “administrasi pendidikan Islam”, “Islamic educational administration”, “Islamic governance”, “Islamic leadership”, amanah, shura, justice, masalah, “Islamic work ethic”, strategic management, quality management, dan digital transformation. Literatur Arab ditelusuri berdasarkan judul dan tema al-idārah al-tarbawīyah, al-takhṭīf, al-isyrāf, al-riqābah, dan al-naqd al-tarbawī. Penelusuran menggunakan sampling teoretis-purposif karena tujuan kajian ialah membangun hubungan antarkonsep, bukan mengklaim cakupan sistematis yang exhaustif.

Korpus analisis terdiri atas enam literatur berbahasa Arab dan delapan studi empiris. Lima studi empiris secara langsung membahas konteks pendidikan Islam, sedangkan tiga studi lain berasal dari organisasi sosial-keagamaan atau bisnis Islam dan digunakan sebagai bukti pendukung mekanisme. Sumber dimasukkan jika memiliki tujuan dan metode yang jelas, data lapangan, temuan yang relevan dengan akuntabilitas, keputusan, kepemimpinan, strategi, mutu, atau digitalisasi, serta identitas publikasi yang dapat diverifikasi. Artikel normatif tanpa metode, duplikasi, sumber dengan kesimpulan yang tidak didukung data, dan kajian yang tidak relevan dengan mekanisme administrasi dikeluarkan.

Evaluasi kualitas dilakukan secara naratif melalui enam kriteria: kejelasan tujuan, kesesuaian desain, keterlacakan konteks atau sampel, kejelasan pengumpulan data, kecukupan analisis, dan konsistensi antara hasil serta kesimpulan. Bukti langsung dari lembaga pendidikan diberi bobot interpretatif lebih tinggi daripada bukti lintas konteks. Bukti lintas konteks tidak digunakan untuk melakukan generalisasi langsung, tetapi untuk menguji apakah pola mekanisme yang sama muncul pada organisasi Islam lain.

Unit analisis konseptual mencakup al-idārah, al-tadbīr, al-tanzhīm, al-riqābah, al-amānah, al-shūrā, al-‘adl, al-maṣlahah, dan al-itqān. Tabayyun dan hisbah diperlakukan sebagai konsep pendukung untuk validasi informasi dan pengawasan etis. Data dikodekan dalam lima kategori: makna konsep, fungsi administratif, mekanisme implementasi, kondisi kontekstual, dan luaran organisasi. Analisis dilakukan melalui reduksi, perbandingan antarsumber, pengelompokan pola, pencarian bukti yang mendukung maupun membatasi, serta penyusunan proposisi. Validitas argumentasi dijaga melalui triangulasi jenis sumber dan penyajian jejak sintesis pada tabel serta model

Tabel 1. Komposisi korpus dan fungsi analitis

Kategori	Jumlah	Konteks	Fungsi dalam sintesis
Literatur Arab konseptual	6 sumber	Administrasi, perencanaan, supervisi, kritik pendidikan	Klarifikasi istilah dan struktur fungsi
Bukti langsung pendidikan Islam	5 studi, 2024–2025	Sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi	Menilai mekanisme pada konteks pendidikan
Bukti pendukung organisasi Islam	3 studi, 2023–2025	Masjid, koperasi Islam, dan organisasi lintas sektor	Menguji pola mediasi, kontrol, dan iklim organisasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Konseptual Administrasi Pendidikan Islam

Hasil analisis menunjukkan bahwa administrasi pendidikan Islam memiliki struktur konseptual yang berjenjang. Al-idārah berfungsi sebagai konsep payung yang menghubungkan tujuan, manusia, sumber daya, keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Aqouni (n.d.) menjelaskan administrasi sebagai seni mencapai tujuan lembaga melalui pengarahan usaha kelompok dan koordinasi tugas dalam batas sumber daya serta lingkungan organisasi. Definisi ini menunjukkan bahwa administrasi tidak identik dengan pekerjaan dokumentasi, tetapi mencakup proses kolektif yang diarahkan pada tujuan.

Al-tadbīr menjelaskan proses penalaran sebelum tindakan. Konsep ini mencakup identifikasi kebutuhan, penetapan prioritas, antisipasi risiko, dan penataan sumber daya. Al-tanzhīm mengubah rencana menjadi struktur melalui pembagian peran, delegasi, koordinasi, dan garis pertanggungjawaban. Al-riqābah menghubungkan standar dengan hasil melalui pemantauan, identifikasi deviasi, tindakan korektif, dan pembelajaran. Ketiga fungsi tersebut memperlihatkan hubungan logis antara perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.

Nilai etik mengatur kualitas penggunaan fungsi manajerial. Al-amānah mengikat kewenangan dengan integritas, kompetensi, keterbukaan, dan pertanggungjawaban. Al-shūrā mengatur partisipasi, pertukaran alasan, dan legitimasi keputusan. Al-‘adl menuntut konsistensi prosedur, proporsionalitas distribusi, dan penghormatan dalam interaksi. Al-maṣlahah menilai manfaat, risiko, keberlanjutan, serta dampak bagi kelompok yang terpengaruh. Al-itqān mengarahkan ketepatan, disiplin, mutu, dan perbaikan berkelanjutan. Tabayyun memperkuat validitas informasi, sedangkan hisbah mengarahkan pengawasan pada pencegahan, koreksi, dan pembinaan.

Hubungan antarkonsep tidak bersifat paralel, tetapi sekuensial. Nilai memberi kriteria keputusan. Keputusan diterjemahkan melalui al-tadbīr, al-tanzhīm, dan al-idārah. Pelaksanaan dikendalikan melalui al-riqābah, hisbah, dan itqan. Luaran dinilai melalui akuntabilitas, kualitas keputusan, keadilan organisasi, mutu layanan, kepercayaan publik, dan kemaslahatan. Struktur ini menjadi dasar operasionalisasi administrasi pendidikan Islam.

Tabel 2. Pemetaan konsep, mekanisme, dan indikator operasional

Konsep	Fungsi	Indikator operasional
الإدارة Al-idārah	Pengelolaan terpadu	Integrasi rencana, struktur, layanan, dan evaluasi
التدبير Al-tadbīr	Penalaran dan perencanaan	Analisis kebutuhan, prioritas, risiko, dan alokasi
التنظيم Al-tanzhīm	Pengorganisasian	Uraian peran, delegasi, koordinasi, dan beban kerja
الرقابة Al-riqābah	Pemantauan dan koreksi	Standar, monitoring, audit, dan tindak lanjut
الأمانة Al-amānah	Akuntabilitas moral dan jabatan	Transparansi, kompetensi, pelaporan, konflik kepentingan
الشورى Al-shūrā	Keputusan partisipatif	Keterwakilan, forum, dokumentasi alasan, umpan balik
العدل Al-‘adl	Keadilan organisasi	Konsistensi prosedur, distribusi proporsional, mekanisme banding
المصلحة Al-maṣlahah	Orientasi manfaat	Analisis dampak, risiko, kelompok rentan, keberlanjutan
الإتقان Al-itqān	Mutu dan profesionalitas	Standar layanan, kompetensi, evaluasi, perbaikan

Pola Empiris: Nilai Memerlukan Mekanisme dan Kapasitas

Sintesis delapan studi empiris menghasilkan pola utama bahwa nilai tidak bekerja secara otomatis terhadap kinerja. Badar et al. (2024) menemukan pada 239 pegawai di Qatar bahwa etika kerja Islam berhubungan dengan kinerja organisasi dan iklim hubungan pegawai, serta bahwa iklim tersebut memediasi hubungan etika dengan kinerja. Pada konteks koperasi Islam, Amar et al. (2025) menemukan pada 124 pegawai bahwa maqasid syariah memberi pengaruh tidak langsung terhadap kinerja melalui

manajemen strategis. Kedua studi mendukung mekanisme nilai–proses–luaran, bukan hubungan langsung yang sederhana.

Pola yang sama terlihat pada pengelolaan keuangan organisasi keagamaan. [Habibi et al. \(2023\)](#) menemukan pada 500 pengurus masjid bahwa pengetahuan dan sikap keuangan berhubungan positif dengan pengelolaan keuangan, sedangkan pengendalian diri memperkuat hubungan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa amanah perlu diterjemahkan ke dalam kompetensi, prosedur, dan kontrol internal. Integritas tanpa kemampuan teknis dapat menghasilkan pengelolaan yang lemah, sedangkan prosedur tanpa integritas meningkatkan risiko kepatuhan formal yang tidak substantif.

Bukti langsung dari pendidikan Islam menegaskan peran kapasitas kontekstual. [Mintasih et al. \(2024\)](#) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi oleh 30 guru pada 19 sekolah dibatasi oleh kompetensi digital dan ketimpangan infrastruktur. [Kurniawan et al. \(2024\)](#) menemukan peningkatan kinerja penyusunan modul setelah penggunaan ChatGPT pada 22 guru, tetapi desain pra-eksperimen dan sampel kecil membatasi generalisasi. [Abidin et al. \(2025\)](#) juga menemukan bahwa inovasi digital pada tiga pesantren meningkatkan motivasi, fleksibilitas, dan interaksi, tetapi bergantung pada literasi serta ketersediaan sarana.

[Zakiyyah et al. \(2024\)](#) menunjukkan bahwa mutu pembelajaran digital memerlukan integrasi modul dan sistem pembelajaran, infrastruktur, pelatihan guru, serta pembinaan karakter. Temuan ini konsisten dengan itqan sebagai kombinasi standar, kompetensi, dan perbaikan, bukan sekadar penggunaan perangkat. [Rediyono et al. \(2025\)](#) menemukan bahwa keteladanan kepemimpinan Islam memperkuat kepercayaan, kolaborasi, etos kerja, dan profesionalitas pada tiga perguruan tinggi Muhammadiyah. Namun, studi tersebut juga mencatat kesenjangan komunikasi dan ketidakkonsistenan implementasi nilai antarunit.

Secara keseluruhan, bukti empiris mendukung tiga kesimpulan. Pertama, nilai bekerja melalui mekanisme seperti strategi, iklim hubungan, kontrol, dan budaya. Kedua, kapasitas berupa kompetensi, kepemimpinan, infrastruktur, regulasi, dan komunikasi menentukan kualitas implementasi. Ketiga, luaran perlu dinilai secara multidimensi, tidak hanya melalui efisiensi, tetapi juga akuntabilitas, keadilan, mutu, kepercayaan, dan manfaat. Karena desain serta konteks studi berbeda, sintesis ini tidak membuktikan kausalitas universal. Temuan digunakan untuk membangun proposisi yang masih memerlukan pengujian langsung pada lembaga pendidikan Islam.

Tabel 3. Sintesis bukti empiris dan implikasi mekanistik

Studi	Konteks/Desain	Temuan relevan	Implikasi bagi model
Habibi et al. (2023)	Masjid; survei 500 pengurus	Pengetahuan, sikap, dan pengendalian diri mendukung pengelolaan keuangan	Amanah membutuhkan kompetensi dan kontrol
Badar et al. (2024)	Lintas sektor; survei 239 pegawai	Iklim hubungan memediasi etika kerja Islam dan kinerja	Nilai bekerja melalui iklim organisasi
Mintasih et al. (2024)	19 sekolah; 30 guru PAI	Pemanfaatan digital dibatasi kompetensi dan infrastruktur	Kapasitas dan keadilan akses memoderasi hasil
Kurniawan et al. (2024)	Pra-eksperimen; 22 guru PAI	ChatGPT meningkatkan penyusunan modul; generalisasi terbatas	Inovasi memerlukan tabayyun dan standar mutu
Zakiyyah et al. (2024)	Studi fenomenologis; sekolah Islam	Mutu digital memerlukan sistem, sarana, pelatihan, dan karakter	Itqan bersifat sistemik
Rediyono et al. (2025)	Tiga perguruan tinggi Muhammadiyah	Keteladanan memperkuat kepercayaan dan profesionalitas; implementasi belum konsisten	Amanah bekerja melalui kepemimpinan dan budaya

Abidin et al. (2025)	Tiga pesantren Jawa Timur	Teknologi meningkatkan fleksibilitas dan interaksi; terkendala literasi dan sarana	Masalah dipengaruhi kapasitas kontekstual
Amar et al. (2025)	Koperasi Islam; survei 124 pegawai	Maqasid berpengaruh tidak langsung melalui manajemen strategis	Nilai memerlukan mediasi manajerial

Kekuatan, Konsistensi, dan Batas Bukti

Kekuatan sintesis terletak pada konsistensi pola mekanistik yang muncul dari konteks berbeda. Studi pada sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi menunjukkan bahwa teknologi, kepemimpinan, serta nilai kelembagaan menghasilkan manfaat ketika didukung kompetensi, infrastruktur, komunikasi, dan sistem mutu. Studi survei pada masjid, koperasi Islam, dan organisasi kerja memperkuat pola tersebut melalui hubungan antara nilai, kontrol diri, iklim organisasi, manajemen strategis, dan kinerja. Konvergensi ini tidak membuktikan bahwa seluruh konteks memiliki hubungan yang identik, tetapi memberi alasan rasional untuk menempatkan mekanisme dan kapasitas sebagai penghubung antara nilai dan luaran.

Bukti yang berasal langsung dari lembaga pendidikan Islam memiliki relevansi konteks yang tinggi, tetapi kekuatan inferensinya belum seragam. Studi kualitatif dan fenomenologis mampu menjelaskan proses, hambatan, serta makna implementasi, tetapi tidak mengestimasi besar pengaruh. Studi pra-eksperimen memberi indikasi perubahan kinerja, namun belum sepenuhnya menyingkirkan pengaruh pengalaman, motivasi, atau faktor eksternal. Sampel yang relatif kecil dan pemilihan lokasi secara terbatas juga membuat temuan lebih tepat digunakan untuk membangun proposisi daripada menyatakan hubungan yang berlaku universal.

Studi survei dengan jumlah responden lebih besar memberikan dukungan yang lebih kuat terhadap peran mediasi dan moderasi, tetapi sebagian tidak dilakukan pada lembaga pendidikan. Artikel ini menggunakan studi tersebut sebagai bukti mekanistik pendukung, bukan sebagai bukti langsung efektivitas administrasi pendidikan Islam. Perbedaan ini penting agar transfer konsep tidak berubah menjadi generalisasi yang berlebihan. Sebuah mekanisme hanya layak diadopsi ketika memiliki kesesuaian fungsi, struktur kewenangan, karakter pemangku kepentingan, dan jenis luaran dengan konteks pendidikan.

Sintesis juga mempertimbangkan penjelasan alternatif. Kinerja dapat dipengaruhi oleh sumber daya, regulasi, ukuran lembaga, kepemimpinan, dan kematangan digital, bukan hanya nilai yang dinyatakan organisasi. Karena itu, MAPII tidak menempatkan religiositas deklaratif sebagai penyebab tunggal. Model menuntut bukti berupa prosedur, perilaku, dokumentasi keputusan, tindakan korektif, serta luaran layanan. Prinsip ini meningkatkan keterujian model dan mengurangi risiko menjadikan nilai Islam sebagai label normatif yang tidak dapat dievaluasi secara ilmiah.

Model Administrasi Pendidikan Islam Integratif

Berdasarkan struktur konsep dan pola empiris, MAPII dirumuskan sebagai model proposisional dengan empat lapisan proses, satu kelompok kapasitas kontekstual, dan satu lapisan luaran. Lapisan pertama ialah fondasi etik berupa tauhid dan amanah. Tauhid memberi batas moral pada penggunaan kewenangan. Amanah menerjemahkan orientasi tersebut menjadi integritas, kompetensi, keterbukaan, dan pertanggungjawaban. Fondasi etik tidak menggantikan aturan formal, tetapi menentukan tujuan dan cara aturan digunakan.

Lapisan kedua ialah tata kelola keputusan yang memuat syura, tabayyun, keadilan, dan masalah. Syura menentukan siapa yang perlu dilibatkan dan bagaimana pendapat dipertimbangkan. Tabayyun mengatur kualitas data dan verifikasi klaim. Keadilan menilai konsistensi prosedur, distribusi beban serta sumber daya, dan perlakuan terhadap warga lembaga. Masalah menilai manfaat, risiko, dampak jangka panjang, dan perlindungan kelompok rentan. Keempat prinsip tersebut membentuk keputusan yang partisipatif, berbasis bukti, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lapisan ketiga ialah proses manajerial yang terdiri atas al-tadbīr, al-tanzhīm, dan al-idārah. Al-tadbīr mengubah kebutuhan menjadi sasaran, prioritas, risiko, dan rencana. Al-tanzhīm membagi peran, kewenangan, sumber daya, dan koordinasi. Al-idārah menyatukan perencanaan, pelaksanaan, layanan, dan evaluasi. Lapisan keempat ialah kontrol dan pembelajaran melalui al-riqābah, hisbah, dan itqan.

Kontrol tidak diarahkan untuk mencari kesalahan semata, tetapi untuk mendeteksi deviasi, melindungi hak, memperbaiki proses, dan meningkatkan mutu.

Kapasitas kontekstual memengaruhi kekuatan seluruh hubungan dalam model. Kapasitas tersebut mencakup kualitas kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur, regulasi, budaya organisasi, dan ketersediaan data. Nilai yang sama dapat menghasilkan luaran berbeda ketika kapasitas dan konteksnya berbeda. Karena itu, MAPII menolak asumsi universal yang tidak mempertimbangkan karakter lembaga. Model perlu diadaptasi pada struktur madrasah negeri, pesantren berbasis komunitas, sekolah Islam swasta, dan perguruan tinggi.

Luaran MAPII mencakup akuntabilitas, kualitas keputusan, keadilan organisasi, mutu layanan, kepercayaan publik, dan kemaslahatan. Luaran tersebut saling berkaitan, tetapi tidak identik. Efisiensi dapat meningkat tanpa keadilan, dan kepatuhan dokumen dapat meningkat tanpa perbaikan layanan. Oleh sebab itu, evaluasi administrasi pendidikan Islam perlu menggunakan indikator proses dan hasil. Indikator proses menilai kualitas keputusan, transparansi, keterwakilan, audit, dan tindak lanjut. Indikator hasil menilai mutu, akses, kepercayaan, kepuasan, serta dampak pendidikan.

Model ini melengkapi administrasi modern, bukan menolaknya. Perencanaan strategis, indikator kinerja, audit, sistem informasi, dan penjaminan mutu tetap diperlukan. Kontribusi Islam terletak pada kriteria moral serta sosial yang mengarahkan instrumen tersebut. Sebaliknya, kontribusi administrasi modern terletak pada kemampuan mengubah nilai menjadi prosedur dan bukti. Integrasi keduanya mencegah dua kelemahan, yaitu tata kelola teknis yang kehilangan orientasi etik dan retorika nilai yang tidak memiliki mekanisme implementasi.

Pada tata kelola digital, MAPII memberi kerangka yang relevan. Amanah mengatur kepemilikan, privasi, dan penggunaan data. Tabayyun mengatur validasi data serta keluaran kecerdasan artifisial. Keadilan mengatur akses dan risiko diskriminasi. Masalah menilai manfaat investasi digital. Hisbah mengatur audit dan penanganan insiden. Itqan menuntut keamanan, kompetensi pengguna, dan evaluasi berkelanjutan. Dengan demikian, transformasi digital dipahami sebagai perubahan tata kelola, bukan sekadar pengadaan aplikasi.

Kontribusi teoretis artikel adalah pergeseran dari pendekatan daftar nilai menuju penjelasan berbasis mekanisme. MAPII menunjukkan bahwa hubungan nilai dan luaran dimediasi oleh tata kelola keputusan serta proses manajerial, dan dipengaruhi kapasitas kontekstual. Kontribusi praktisnya ialah tersedianya kerangka untuk menyusun SOP, indikator evaluasi, instrumen penelitian, dan kebijakan digital. Model ini tetap bersifat proposisional. Validitas konstruk, hubungan antardimensi, dan daya jelasnya harus diuji melalui penelitian multisitus.

MODEL ADMINISTRASI PENDIDIKAN ISLAM INTEGRATIF (MAPII)



Gambar 1. Model Administrasi Pendidikan Islam Integratif (MAPII)**Tabel 4. Proposisi dan indikator awal pengujian MAPII**

Proposisi	Hubungan konseptual	Indikator awal
P1	Amanah meningkatkan akuntabilitas melalui transparansi, kompetensi, dan kontrol	Keterbukaan laporan, konflik kepentingan, tindak lanjut audit
P2	Syura dan tabayyun meningkatkan kualitas keputusan	Keterwakilan, validitas data, dokumentasi alasan, implementabilitas
P3	Keadilan meningkatkan kepercayaan organisasi	Konsistensi prosedur, distribusi beban, akses, mekanisme banding
P4	Masalah meningkatkan penerimaan dan keberlanjutan kebijakan	Manfaat, risiko, dampak kelompok rentan, keberlanjutan
P5	Hisbah dan itqan meningkatkan mutu layanan melalui koreksi dan pembelajaran	Deviasi, tindakan korektif, kompetensi, pemenuhan standar
P6	Kapasitas kontekstual memperkuat atau memperlemah hubungan P1–P5	Kepemimpinan, SDM, infrastruktur, regulasi, budaya, kualitas data

Implikasi dan Agenda Pengujian

Bagi pengelola lembaga, MAPII dapat diterjemahkan ke dalam siklus tata kelola. Perencanaan perlu memuat analisis kebutuhan, pihak terdampak, risiko, dan indikator manfaat. Pengorganisasian perlu menjelaskan uraian tugas, delegasi, pemisahan kewenangan, dan mekanisme koordinasi. Pengambilan keputusan perlu mendokumentasikan data, pihak yang dilibatkan, alternatif, alasan, dan rencana evaluasi. Pengawasan perlu menghubungkan temuan dengan tindakan korektif, penanggung jawab, jadwal, dan bukti penyelesaian.

Bagi yayasan dan regulator, evaluasi tidak cukup memeriksa keberadaan dokumen. Evaluasi perlu menilai kualitas proses keputusan, keterbukaan informasi, distribusi sumber daya, tindak lanjut audit, perlindungan peserta didik, dan manfaat layanan. Indikator perlu disesuaikan dengan bentuk serta kapasitas lembaga. Standar yang terlalu seragam berisiko mengabaikan perbedaan kewenangan, sumber daya, dan karakter komunitas.

Pengujian empiris dapat dilakukan bertahap. Tahap pertama ialah validasi isi melalui panel ahli administrasi pendidikan, studi Islam, dan metodologi. Tahap kedua ialah pengembangan instrumen berbasis indikator perilaku dan bukti dokumen. Tahap ketiga ialah analisis faktor untuk menilai struktur konstruk. Tahap keempat ialah pengujian model melalui survei multisitus, structural equation modeling, dan studi kasus komparatif. Desain longitudinal dibutuhkan untuk menilai apakah perbaikan tata kelola bertahan dan berhubungan dengan mutu serta kepercayaan publik.

Penelitian lanjutan perlu mengantisipasi bias kepatutan sosial ketika mengukur amanah atau religiositas. Pengukuran perlu menggabungkan persepsi, dokumen, observasi, data kinerja, dan penilaian pemangku kepentingan. Peneliti juga perlu menguji peran moderator seperti ukuran lembaga, status kepemilikan, regulasi, kepemimpinan, dan kematangan digital. Langkah ini menjaga agar MAPII berkembang sebagai teori yang terbuka terhadap pengujian dan koreksi.

Keterbatasan Kajian

Kajian ini memiliki tiga batasan yang perlu dipertimbangkan ketika menafsirkan hasil. Pertama, korpus dipilih secara purposif untuk memperoleh keragaman konsep, mekanisme, dan konteks, bukan untuk menghitung seluruh publikasi yang tersedia. Karena itu, hasil tidak menunjukkan prevalensi tema atau mewakili seluruh praktik administrasi pendidikan Islam. Literatur Arab yang dianalisis juga berupa karya administrasi pendidikan modern dan sumber normatif, bukan manuskrip klasik yang memerlukan kritik filologis. Posisi metodologis ini sengaja dipertahankan agar klaim artikel sesuai dengan karakter data.

Kedua, studi empiris memiliki desain, unit analisis, dan konteks yang heterogen. Sebagian bukti berasal langsung dari sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam, sedangkan sebagian lain berasal dari organisasi Islam sebagai bukti mekanistik pendukung. Heterogenitas tersebut memperluas daya

jelajah konseptual, tetapi membatasi inferensi kausal dan generalisasi. Ketiga, proses pengodean belum menggunakan pengukuran kesepakatan antarpengode. Oleh karena itu, MAPII harus dipahami sebagai model proposisional yang memerlukan validasi ahli, pengembangan instrumen, pengujian faktor, dan pengujian multisitus sebelum digunakan sebagai standar evaluasi kelembagaan.

4. KESIMPULAN

Tinjauan integratif ini menunjukkan bahwa administrasi pendidikan Islam merupakan sistem yang menghubungkan nilai, keputusan, proses manajerial, kontrol, kapasitas kontekstual, dan luaran kelembagaan. Al-idārah, al-tadbīr, al-tanzhīm, dan al-riqābah menyediakan struktur kerja, sedangkan amanah, syura, keadilan, masalah, hisbah, tabayyun, dan itqan mengarahkan kualitas penggunaannya. Sintesis empiris memperlihatkan bahwa nilai tidak otomatis menghasilkan kinerja. Nilai bekerja melalui strategi, transparansi, iklim hubungan, kompetensi, budaya, pengawasan, dan perbaikan. MAPII merumuskan hubungan tersebut ke dalam rantai nilai–mekanisme–kapasitas–luaran. Model ini memberi dasar yang lebih logis dan operasional bagi pengelolaan madrasah, pesantren, sekolah Islam, dan perguruan tinggi Islam. Namun, model masih bersifat proposisional karena korpus dipilih secara purposif dan belum diuji secara langsung. Penelitian berikutnya perlu memvalidasi konstruk, mengembangkan instrumen, dan menguji hubungan antardimensi pada beragam konteks lembaga.

5. REFERENSI

- Abidin, Z., Qusairi, A., Hanifansyah, N., & Mubarak, F. (2025). Learning innovation in Islamic boarding schools in East Java: Technology's role in enhancing teaching effectiveness. *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, 12(1), 63–76. <https://doi.org/10.15408/tjems.v12i1.45642>
- Abu 'Azzam, M. K. (2020). Al-idārah al-ta'limiyyah wa al-isyrāf al-tarbawī [Administrasi pendidikan dan supervisi pendidikan]. Dar Zuḥdi.
- Al-'Ajami, M. H. (2013). Al-idārah wa al-takhfīf al-tarbawī: Al-nazariyyah wa al-taṭbīq [Administrasi dan perencanaan pendidikan: Teori dan aplikasi]. Dar al-Masirah.
- Al-'Amiri, M. U. (2017). Qaḍāyā mu'āṣirah fī al-idārah al-tarbawīyyah [Isu kontemporer dalam administrasi pendidikan]. Dar al-Mu'taz.
- Al-Ba'dani, M. N. M. A. (2013). Asāsiyyāt al-idārah wa al-isyrāf al-tarbawī min manzūrihā al-'ām wa al-Islāmī [Dasar administrasi dan supervisi pendidikan dalam perspektif umum dan Islam]. Universitas Al-Iman.
- Al-Jabiri, H. bin N. (2014). Al-naqd al-tarbawī fī al-manhaj al-Islāmī [Kritik pendidikan dalam metodologi Islam]. Universitas Islam Madinah.
- Amar, F., Sumardi, S., & Nugraha, D. P. (2025). Role strategic management and maqasid sharia toward Islamic cooperative performance. *Etikonomi*, 24(1), 247–264. <https://doi.org/10.15408/etk.v24i1.44588>
- Aqouni, M. (n.d.). Mawsū'ah al-tasyīr al-tarbawī wa al-idārī [Ensiklopedia pengelolaan pendidikan dan administrasi]. Dar al-Gharb.
- Badar, K., Aboramadan, M., Alhabib, W., Dahleez, K. A., & Farao, C. (2024). Does employee relations climate mediate the effect of Islamic work ethics on organizational performance? Evidence from Qatar. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(8), 1205–1221. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2022-0164>
- Cronin, M. A., & George, E. (2023). The why and how of the integrative review. *Organizational Research Methods*, 26(1), 168–192. <https://doi.org/10.1177/1094428120935507>
- Habibi, A., Syarif, A. H., Normasyhuri, K., & Nurmalia, G. (2023). Financial management practices of mosques in Indonesia: Is self-control important for moderation? *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(2), 295–330. <https://doi.org/10.15408/aiq.v15i2.34865>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Kurniawan, S., Herlambang, S., Sari, N., Fadian, F., Suratman, B., Nurhidayah, V. A., Naffati, A. K., & Torikoh. (2024). Making peace with change: The effect of GPT Chat utilization on the performance of Islamic religion teachers in creating teaching modules. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 21(2), 492–509. <https://doi.org/10.14421/jpai.v21i2.9767>
- Mintasih, D., Sukiman, S., & Purnama, S. (2024). Integration of digital technology in Islamic religious education learning: A qualitative study on teachers' competence and implementation models in secondary schools. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 85–96. <https://doi.org/10.14421/jpi.2024.131.85-96>
- Rediyono, R., Nasirin, R., Wulansari, N. F., & Samy, S. (2025). Islamic leadership and organizational culture in Muhammadiyah higher education: The relationship between values and academic performance. *Jurnal Indo-Islamika*, 15(2), 465–481. <https://doi.org/10.15408/jii.v15i2.48744>
- Rini, R., Hidayat, W., Asmendri, A., & Sari, M. (2025). Integrasi nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan pada perencanaan pendidikan di sekolah Islam. *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 5(3), 503–516. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v5i3.2594>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Syarif, T. R., & Nadzri, F. A. A. (2024). Principles of governance in the Quran and their role in eradicating corruption. *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, 25(2), 53–63. <https://doi.org/10.37231/jimk.2024.25.2.884>
- Torraco, R. J. (2016). Writing integrative literature reviews: Using the past and present to explore the future. *Human Resource Development Review*, 15(4), 404–428. <https://doi.org/10.1177/1534484316671606>
- Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: Updated methodology. *Journal of Advanced Nursing*, 52(5), 546–553. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x>
- Zakiyyah, I., Suparto, S., Karo-Karo, I. A., & Zakir, M. N. A. (2024). Digital technology and socio-dynamic aspects of Indonesian Islamic religious education: A total quality management perspective. *Jurnal Indo-Islamika*, 14(2), 328–343. <https://doi.org/10.15408/jii.v14i2.43760>